

Kepala Bagian Keuangan Bapak LM. Davis, SE yang dapat menjelaskan sikapnya terhadap hal ini.

"SOT yang baru ini membuat pegawai bingung karena banyak yang kehilangan jabatan dan sumber penghasilan, lihatlah banyak pejabat yang nyogok untuk sebuah jabatan, SOT ini mungkin niatnya baik tapi nasib pegawai dan pertimbangan kemanusiaan perlu dipikirkan agar SOT ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan kabupaten tanpa melupakan pegawai. Apa menjamin dengan SOT yang baru menyebabkan pemda lebih efisien dan responsive? kan tidak semudah itu, jadi perlu kematangan dan pengetahuan yang cukup sebelum hal ini dilakukan" (Hasil wawancara penulis, 6 September 2013).

Selanjutnya untuk item pernyataan bahwa pemerintah mengembangkan usaha mencari keuntungan (profit oriented) sebagai sumber pendapatan sebanyak 9 orang (13,3%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden tidak setuju bila pemerintah mengembangkan usaha mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan dan hanya sebagian kecil yang setuju untuk hal ini.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pejabat dan observasi lapangan menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa disamakan dengan pihak swasta karena misinya berbeda dengan pemerintah, selanjutnya aparat pemerintah banyak yang tidak mempunyai kemampuan wirausaha dan terakhir banyak usaha-usaha yang dijalankan pemerintah rugi, kebocoran dimana-dimana, ditambah lagi efisiensi jauh dari yang diharapkan seperti perusahaan-perusahaan milik pemerintah baik dipusat maupun di daerah. Hal ini terungkap dari beberapa hasil wawancara dengan M. Mahyuddin M, ST., M.Si Kasubag Prasarana Fisik Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton berikut ini:

"Menurut saya memang sudah saatnya pemerintah berpikir untuk mencari sumber pendapatan baru, apalagi dengan otonomi daerah ini mau tidak mau suka tidak suka kalau mau jalan suatu pemerintah daerah ia harus punya sumber pendapatan yang besar. Kita dibengkalis terbantu oleh dana perimbangan minyak jika ini tidak ada, kitapun sama tahu bengkalis menjadi hanyut

bila kita tidak punya pemikiran mencari sumber pendapatan alternatif selain dana perimbangan." (Hasil wawancara penulis, 6 September 2013).

Begitulah adanya pemahaman dan pengertian yang beragam dari setiap responden mengenai setiap pernyataan yang ada dengan alasan yang berbeda pula, Setiap orang punya alasan tersendiri untuk menjawab setuju ataupun tidak setuju. Itulah gambaran umum jawaban responden terhadap aspek *profit oriented* yang dikembangkan pemerintah dengan alasannya setuju dan ketidaksetujuan mereka.

Persepsi Pejabat Birokrasi Pemerintah dalam Kewirausahaan.

Aspek Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Kewirausahaan

Tabel IV.8. Aspek Pengetahuan dan Sikap Terhadap Kewirausahaan

No	Inti Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pemahaman saya terhadap konsep Entrepreneurial Government sudah baik	20	29,5
2	Pemahaman dan pengetahuan konsep Entrepreneurial Government didapat dari seminar, diklat, membaca buku atau bingkai kuliah	23	35,9
3	Konsep Entrepreneurial Government dapat diaplikasikan kedalam kondisi di kabupaten	25	36,7
Jumlah		68	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel IV.8 terlihat bahwa hasil penilaian dan pandangan responden terhadap aspek pengetahuan dan sikap terhadap kewirausahaan untuk item pemahaman saya terhadap konsep *entrepreneurial government* sudah baik, sebanyak 20 orang (29,5%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden tidak memahami konsep *entrepreneurial government* dengan baik.

Berikut ini wawancara penulis dengan Yusniah, S.Sos selaku Kasubag Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Data pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian yang menggambarkan kesimpulan tersebut:

"Saya tak tahu apa itu Entrepreneurial Government, memang pernah dengar tapi ya tadi hanya sekilas-sekilas saja, kadang dengar di TV atau baca koran jadi saya tak paham betul mengenai itu apalagi saya cuma tamat SLTA." Saya memang pernah dengar tentang